

## ABSTRAK

Khairil Hidayat Agani: *Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt tentang Isbat Nikah di Bawah Umur*, di bawah bimbingan I : Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH. , II; Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Indonesia sebagai negara hukum telah menunjuk Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya dapat menghadirkan kesetaraan atau kedudukan yang sama di hadapan hukum bagi masyarakat (*equality before the law*). Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bagi orang-orang beragama Islam di Kabupaten Paser yang berwenang mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan dua penetapan yang berbeda dalam suatu perkara yang isu hukumnya sama yaitu permohonan isbat nikah di bawah umur. Disparitas ini membawa dampak yang kontraproduktif dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat, rasa keadilan publik, kepastian hukum dan kemanfaatan. Aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus dieksplorasi pada setiap penetapan tersebut dalam rangka mengukur hukum yang baik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *case approach* (pendekatan kasus) dan *comparation approach* (pendekatan perbandingan). Sumber data dalam penelitian adalah Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. dan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt dan bahan kepustakaan lain atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data (bahan hukum) dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi dan wawancara *in depth*. Kemudian Penulis akan mengkaji dan menganalisa segala ketentuan hukum tentang pokok permasalahan dengan metode pendekatan perbandingan lalu menarik suatu kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot terletak pada penerapan secara berbeda ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dalam

Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. Pengadilan Agama Tanah Grogot melakukan interpretasi sistematis, memandang norma yang terkandung dalam semua level peraturan sebagai satu kesatuan, sedangkan dalam Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. Pengadilan Agama Tanah Grogot melakukan interpretasi intensif yaitu mempersempit klausul “halangan” dalam pasal tersebut sebagai “larangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. lebih mencerminkan keadilan prosedural, mengedepankan aspek kepastian hukum dan membawa manfaat yang selaras dengan penegakan hukum dibandingkan dengan Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., yang berupaya untuk mengedepankan keadilan substantif namun di sisi lain melegitimasi masyarakat dengan pola pikir pragmatis untuk tetap melakukan pernikahan di bawah umur tanpa melalui izin pengadilan.

## ABSTRACT

Khairil Hidayat Agani: *Disparity in the Verdict of Tanah Grogot Religious Court Number 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. and Verdict Number 366/Pdt.P/2021/PA. Tgt on Underage Isbat Nikah*, under the guidance of I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH., II; Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. At the Postgraduate Program of Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2024.

Indonesia as a state of law has appointed the Court as the perpetrator of judicial power. The court as an actor of judicial power should be able to present equality before the law for the community. Tanah Grogot Religious Court as the perpetrator of judicial power for Muslims in Paser Regency who are authorized to try certain cases has handed down two different verdicts in a case with the same legal issue, namely the application for underage marriage isbat (*isbat nikah*). This disparity has a counterproductive impact in fostering public trust, a sense of public justice, legal certainty and utility. Aspects of justice, legal certainty and utility must be explored in each of these verdicts in order to measure good law.

The type of research used in this study is normative legal research, or it can also be referred to as library research. The problems that have been formulated in this study will be answered or solved using the statute approach, case approach and comparative approach. The source of data in the study is the verdict of Tanah Grogot Religious Court Number 248/Pdt.P/2021/PA. Tgt. and verdict Number 366/Pdt.P/2021/PA. Tgt and other literature materials or literature that has something to do with the object of research. The data collection technique (legal material) is carried out using documentation and interviews in depth. Then the author will review and analyze all legal provisions on the subject matter with a comparative approach method and then draw a deductive conclusion.

The results of this study conclude that the Disparity in the verdict of the Tanah Grogot Religious Court lies in the different application of the provisions of Article 7 paragraph 3 letter e of the Compilation of Islamic Law in Indonesia. In verdict Number 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. the Tanah Grogot Religious Court carried out a systematic interpretation, viewing the norms contained in all levels of regulations as a single entity, while in verdict Number 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt. the Tanah Grogot Religious Court carried out an intensive interpretation, namely narrowing the "halangan" clause in the article as a "larangan" as mentioned in Article 8, Article 9 and Article 10 of the Marriage Law. Verdict Number 248/Pdt.P/2021/PA.Tgt. better reflects procedural fairness, prioritizes aspects of legal certainty and brings utilities that are in harmony with law enforcement

compared to verdict Number 366/Pdt.P/2021/PA.Tgt., which seeks to promote substantive justice but on the other hand legitimizes society with a pragmatic mindset to continue underage marriages without going through court permission.